



**PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT**

# **RENJA RENCANA KERJA**

**TAHUN 2023**

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**20  
23**  
**PKAD**



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



**RENCANA KERJA  
( RENJA)  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023**

**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut dan demi kesinambungan pelaksanaan RPJMD, Renstra SKPD khususnya untuk tahun ke empat, maka disusunlah Renja SKPD untuk Tahun Anggaran 2023 yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD dan Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

Disusunnya Renja SKPD adalah dalam rangka penyusunan RKPD untuk Tahun 2023 yang selanjutnya setelah melalui proses sesuai ketentuan, akan dituangkan dalam KUA/PPAS Tahun Anggaran 2023 yang merupakan dasar dalam penyusunan RKA-SKPD. Dimana RKA –SKPD setelah melalui pembahasan oleh TAPD akan diformulasikan kedalam RAPBD Tahun Anggaran 2023.

Oleh karena itu penyusunan Renja SKPD sangatlah penting artinya dalam suatu proses perencanaan dalam rangka pencapaian visi misi, baik untuk RPJMD maupun Tujuan Renstra SKPD itu sendiri.

Dalam dokumen perencanaan Renja SKPD tidak saja memuat Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, namun juga memuat tentang evaluasi atas pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan tahun sebelumnya yang telah dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan dan dicarikan solusinya, sehingga sasaran dalam Renstra SKPD yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.

Pelarian, 18 Juli 2022

**Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut**



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**

**NIP. 19661227 198703 1 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	47
2.3 Isu-Isu Strategis .....	52
2.4 Penelaahan usulan Program dan Kegiatan .....	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .....	57
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	57
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH... ..	62
BAB V PENUTUP.....	87



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jl. A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari 70814

Telp. (0512) 21274 & 21101 Fax. (0512) 21101

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB RENCANA KERJA TAHUN 2023  
BPKAD KABUPATEN TANAH LAUT**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
Jabatan : **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  
Kabupaten Tanah Laut**

Menyatakan akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2023 tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Kami akan melakukan evaluasi terhadap rencana kerja dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pelaihari, 18 Juli 2022

**KEPALA BPKAD  
KABUPATEN TANAH LAUT**



**MUHAMMAD DARMIN, S.IP, M.Si**  
IP: 19661227 198703 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**Jl.A.Syairani Pelaihari Phone. (0512) 21274 Fax. (0512) 21101**  
**PELAIHARI**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR : 050.13/ 18 / BPKAD/ 2022**

**TENTANG**  
**RENCANA KERJA ( RENJA ) BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**  
**DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja ( Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023;
  - b. bahwa untuk melegalkan Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 maka perlu mempunyai dasar hukum yang sah ;
  - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
21. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 31)
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.
- Kedua : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Pertama tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum Kedua merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.



Keempat : Agar seluruh personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut mempedomaninya serta melaksanakan dengan segala kesungguhan dan penuh rasa tanggungjawab.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 Juli 2022

KEPALA BADAN,



**MUHAMMAD DARMIN**

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Tanah Laut (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
4. Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Renja-SKPD disusun dengan mengacu pada RKPD, Renstra-SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan yang akan diusulkan tentunya harus selaras dengan RPJMD dan Renstra SKPD, agar tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai sesuai tahapan waktunya.

Penyelarasan ini penting karena berkaitan dengan kesinambungan suatu perencanaan yang telah ditetapkan, dimana Renja SKPD adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari Renstra SKPD dan RPJMD yang dilakukan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan baik dalam Renstra SKPD maupun dalam RPJMD.

Penyusunan Renja SKPD tentunya nanti akan diteruskan dalam penyusunan RKPD, yang selanjutnya akan dituangkan lagi ke dalam KUA/PPAS sebagai dasar nantinya penyusunan RKA SKPD. Selanjutnya setelah RKA-SKPD dibahas dan dihimpun menjadi dokumen APBD, hasil akhir dokumen perencanaan tahunan adalah ditetapkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan RPJPD, RPJMD, Rencana Strategis SKPD, RKPD, Rencana Kerja SKPD dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (

- Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10);
15. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
  18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut;
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
  20. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023;
  21. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 53);
  22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja (Renja) SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 53);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, antara lain untuk :

- a. Meningkatkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaannya

- b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program
- c. Menyelaraskan program dengan penganggaran
- d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan
- e. Terwujudnya penilaian kerja yang terukur dan perencanaan yang pelaksanaan sesuai dengan Renstra SKPD.

Sedangkan tujuannya adalah :

- a. Menjabarkan Rencana Strategis kedalam program dan kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran ;
- b. Menjadikan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
- c. Sebagai upaya mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran dan program ,kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada pada BPKAD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023
- d. Dipergunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2023 setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Dengan demikian maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 adalah untuk memberikan arah yang jelas berupa program dan kegiatan serta Sub Kegiatan dengan target kinerjanya yang akan dilaksanakan dalam satu Tahun Anggaran, yaitu tahun anggaran 2023.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja ( Renja) SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.Terdiri dari uraian tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

### BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian tentang Program dan Kegiatan.

### BAB V PENUTUP

Berisi tentang catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, apabila laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD belum disusun, maka dapat dibuat rekapitulasi berdasarkan laporan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya, dibandingkan dengan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra SKPD. Pencapaian target kinerja APBD dinilai melalui suatu standar yang mampu menggambarkan tingkat keberhasilan dari program dan kegiatan yang direncanakan, berupa indikator-indikator tertentu dengan target-target kinerja sebagai instrumen penilaian. BPKAD Kabupaten Tanah Laut, selain mempunyai tugas pokok dan fungsi juga melakukan fungsi koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Rata-rata realisasi capaian kinerja atas pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2021 sebesar 92,88 % namun secara umum pencapaian kinerja pelayanan SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut selama 1 tahun cukup berhasil dan sasaran yang ditetapkan dapat terlaksana dengan sangat baik. Tidak mudah memang untuk mencapai apa-apa yang telah ditetapkan, karena dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renja selama kurun waktu 1 tahun adalah juga merupakan implementasi dalam rangka pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018-2023 tetapi bukan berarti sempurna, tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi, sehubungan dengan tugas dan fungsi BPKAD selain tugas dan fungsi selaku SKPD juga sebagai SKPKD (PPKD) dan BUD.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pada umumnya sudah tercapai target pencapaian kinerja



secara keseluruhan, tidak memaksakan menghabiskan anggaran karena disesuaikan dengan kebutuhan prioritas dalam suatu kegiatan.

BPKAD Kabupaten Tanah Laut sebagai salah satu SKPD yang melaksanakan kewenangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah tidak melaksanakan tugas tugas yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang sebagian besar telah ditetapkan dalam SPM oleh masing-masing Kementerian, namun demikian, dalam aspek pengelolaan keuangan dan aset dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2021 pagu anggaran murni sebesar Rp 278.140.595.782,- setelah perubahan adalah sebesar Rp 300.718.140.125,- dengan realisasi pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp 279.312.442.758,-.

Jumlah tingkat capaian kinerja belanja langsung SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut sampai akhir Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar 92,88 %.

Kondisi sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD untuk saat ini cukup memadai baik dari jumlah dan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana lainnya seperti kendaraan dinas/operasional serta peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang dapat menunjang kelancaran tugas pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut

Evaluasi atas pelaksanaan RENJA SKPD BPKAD tahun 2021 yang telah menjadi Belanja Langsung dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel T-C.29 berikut ini :

TABEL T-C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021  
BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan				Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2021				3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)	
5					<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>		-	-	-	-				
5	02				<b>KEUANGAN</b>		-	-	-	-				
5	02	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>IKM</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>	<b>100%</b>	<b>BAIK</b>	<b>BAIK</b>	<b>100%</b>
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	6 Dok	6 (Renja Murni, Renja Perubahan,RKA Murni, RKA Perubahan, DPA Murni dan DPA Perubahan)	2Dok	2Dok	100%	6 Dok	6 Dok	100%
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-

5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
6	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	-	4 (Lapkeu Bulanan Bendaharawan, Lapkeu Akhir Tahun/CALK, Lap. bulanan Capaian Kinerja Keuangan SKPD, Lap. Prognosis semesteran)	4 Dok	4 Dok	100%	-	-	-
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	4 (LAKIP, LKPJ, LPPD dan Lap. Monev Triwulanan)	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									100%
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	55 ASN BPKAD, 5004 ASN se Kabupaten	-	55 ASN BPKAD, 5004 ASN se Kabupaten	55 ASN BPKAD, 5004 ASN se Kabupaten	100%	55 ASN BPKAD, 5004 ASN se Kabupaten	55 ASN BPKAD, 5004 ASN se Kabupaten	100%
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	94 Dokumen	513 Dok	684%	94 Dokumen	94 Dokumen	100%
5	02	01	2.02	05	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verefikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen	94 Dokumen	-	-	-	-	94 Dokumen	94 Dokumen	100%
5	02	01	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	1Dok	1Dok	100%	1Dok	1Dok	100%

5	02	01	2.04	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen	-	-	18 Dok	18 Dok	100%	18 Dok	18 Dok	100%
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah ASN	-	70 Orang	50 Orang	50 Orang	100%	-	-	-
5	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	Jumlah ASN	-	25 Orang	-	-	-	-	-	-
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis	-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	-	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	11 Jenis	11 Jenis	100%
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis	-	2	2	2	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah SKM	-	2 SKM	2 SKM	2 SKM	100%	-	-	-
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	200 kali dan 40 kali	200 kali dan 40 kali	100%
5	02	01	2.07		Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah									
5	02	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Jenis	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%

5	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis	-	-	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	-	-	-
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Jenis	-	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100%	3 Jenis	3 Jenis	100%
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Jenis	1 Jenis	100%
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah Jenis	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	7 Jenis	7 Jenis	100%
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 unit	1 unit	100%
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit	-	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	21 unit	21 unit	100%

5	02	01	2.09	'05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	-	-	-
5	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Jenis	-	12 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100%	5 Jenis	5 Jenis	100%
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung	-	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100%	1 Gedung	1 Gedung	100%
5	02	02			<b>Program Pengelolaan Keuangan daerah</b>	<b>Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Daerah</b>								
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah									
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD	40	-	40	40	100%	40	40	100%
5	02	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD	40	-	40	40	100%	40	40	100%
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	Jumlah SKPD	40	-	40	40	100%	40	40	100%

5	02	02	2.01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	Jumlah SKPD	40	-	40	40	100%	40	40	100%
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen	2 Dok	6 Dok	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	2 Dok	2 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen	2 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	6 Dok	6 Dok	100%
5	02	02	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen	3 Dok	-	3 Dok	3 Dok	100%	480 Dok	480 Dok	100%
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
5	02	02	2.02	03	Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penertiban Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen	750 Dok	-	750 Dok	750 Dok	100%	480 Dok	480 Dok	100%
5	02	02	2.02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%

5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Kali	9 Jenis	-	9 Jenis	9 Jenis	100%	4 kali	4 kali	100%
5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jlh Kali	4 Kali	-	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%
5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Dokumen	2 Dok	-	2 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%
5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	2 Dok	9 Dokumen	2 Dok	2 Dok	100%	1000 Dok	1000 Dok	100%
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									



5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Dokomen	7 Dok	7 Dok	7 Dok	7 Dok	100%	7 Dok	7 Dok	100%
5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokomen	4 Dok	4 Dok	4 Dok	4 Dok	100%	3 Dok	3 Dok	100%
5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Dokomen	8 Dok	8 Dok	8 Dok	8 Dok	100%	7 Dok	7 Dok	100%
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokomen	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokomen	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	100%	6 Dok	6 Dok	100%
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokomen	12 Dok	12 Dok	12 Dok	12 Dok	100%	12 Dok	12 Dok	100%
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokomen	1Dok	1Dok	1 Dok	1 Dok	100%	-	-	-

5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jlh FGD	2 FGD	2 FGD	2 FGD	2 FGD	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jlh Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	130 Desa	100%	130 Desa	130 Desa	100%
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jlh Dokumen	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03			<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	Opini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Daerah								
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah									
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jlh Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jlh Dok	4 Dok	5 dokumen (Standar Satuan Harga, RKBMD dan RKPBMMD, Laporan Triwulan, Stock Opname)	4 Dok	5 Dok	100%	5 Dok	5 Dok	100%
5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jlh Dok	3 Dok	-	3 Dok	2 Dok	100%	2 Dok	2 Dok	100%

5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jlh Dok	16 Dok	21 (1.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah ( KIB A) Unaudit 41 SKPD 2.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Tanah ( KIB A) Audited 41 SKPD 3.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Unaudit 41 SKPD 4.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Peralatan dan Mesin (KIB B) Audited 41 SKPD 5.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan (KIB C) Unaudit 41 SKPD 6.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Gedung dan Bangunan ( KIB C) 41 SKPD Audited 7.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan ( KIB D) Unaudit 41 SKPD 8.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Jalan, Irigasi dan Jaringan ( KIB D) Audited 41 SKPD 9.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya ( KIB E) Unaudit 41 SKPD 10.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Aset Tetap Lainnya ( KIB E) Audited 41 SKPD 11.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Konstruksi dlm Pengerjaan ( KIB F) Unaudit 41 SKPD 12.Buku Rekap Kartu Inventaris Barang Konstruksi dlm Pengerjaan ( KIB F) Audited 41 SKPD 13.Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Unaudit 14.Buku Rekap Mutasi Barang Milik Daerah Audited	16 Dok	16 Dok	100%	16 Dok	16 Dok	100%
---	----	----	------	----	-----------------------------------	---------	--------	--	--------	--------	------	--------	--------	------

								15.Buku Rekap Kartu Inventaris Ruang 41 SKPD 16.Buku Induk Inventaris Kabupaten 17.Buku Induk Inventaris Kabupaten Ektrakomtabel 18.Buku Laporan Barang Milik Daerah 19.Buku Hasil Monitoring & Evaluasi Aset Daerah 20.Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Semester I 21.Buku Laporan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2020 Semester II						
5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jlh Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jlh Buku, Jlh Buah, Jlh Permohonan	5 buku ,40 Buah Papan Nama, 80 Buah Patok tanda batas,1 LS, 32 Permohonan	3 ( Permohonan penyertifikatan, buku rekapitulasi realisasi pemeliharaan dan permohonan BPKB duplikat)	5 buku ,0 Buah Papan Nama	5 buku ,0 Buah Papan Nama	100%	5 buku ,0 Buah Papan Nama	5 buku ,0 Buah Papan Nama	100%

5	02	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jlh Obyek	41 Objek	3 ( Rekapitulasi Pemindahtangan, Rekapitulasi Pemusnahan dan Rekapitulasi Penghapusan)	41 Objek	61 Objek	100%	3 Dok	3 Dok	100%
5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jlh Dok	1 dokumen ,5 buah alat angkutan 6 buah rumah negara	-	1 Dok	1 Dok	100%	1 Dok	1 Dok	100%
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jlh Dok, Jlh kali	8 Dokumen, 15 Kali dok	4 (Rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD, monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD, pemanfaatan BMD, penilaian BMD dan pengembangan Software Aplikasi SIMANTAP)	8 Dokumen, 5 Kali	8 Dokumen, 5 Kali	100%	8 Dokumen, 5 Kali	8 Dokumen, 5 Kali	100%
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jlh Dokumen	8 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	8 Dokumen	100%
5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Jlh SKPD	40 SKPD	-	40 SKPD	40 SKPD	100%	1 Dokumen 40 SKPD	1 Dokumen 40 SKPD	100%

**Evaluasi Hasil Renja Tahun 2021**  
**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

P

No	Sasaran RPKD	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD		Realisasi Kinerja RPJMD sampai dengan RPKD Tahun 2020 (n-2)		Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2021 (n-1) yang dievaluasi								Realisasi Kinerja dan Anggaran RPKD yang dievaluasi (2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPKD Tahun 2021 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2021(Akhir Tahun Pelaksanaan RPKD Tahun 2021)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2021 (%)		SKPD Penanggungjawab	Keterangan		
				5		6		7		8		9		10		11		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12				15=14/5 x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp
<b>Semua Bidang</b>																											
		<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		-	-		39.964.586.858	4.280.016.975	8.151.491.929	6.320.504.563	15.865.470.246	34.617.483.713		86,62%		34.617.483.713		0,00%						<b>BPKAD</b>			
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPKAD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	17	39.669.010	3	7.650.000	-	2.280.000	-	4.659.000	-	17.981.700	3	32.570.700	17,65%	82,11%	3,00	32.570.700	0,00%	0,00%		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	2	9.981.060	-	2.925.000	-	-	2	-	-	4.940.000	1	7.865.000	25,00%	78,80%	0,50	7.865.000	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	1	2.553.000	-	300.000	-	1.125.000	1	75.000	-	700.000	1	2.200.000	100,00%	86,17%	1,00	2.200.000	0,00%	0,00%		

	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	1	2.276.200	-	-	-	-	1	338.000	-	1.550.000	1	1.888.000	100,00 %	82,95 %	1,00	1.888.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	2	6.182.960	-	590.000	-	30.000	-	1.908.000	2	2.099.700	2	4.627.700	100,00 %	74,85 %	2,00	4.627.700	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	1	5.143.190	-	-	-	-	-	380.000	1	4.097.000	1	4.477.000	100,00 %	87,05 %	1,00	4.477.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	4	9.963.600	3	3.835.000	-	-	1	1.958.000	-	2.300.000	-	8.093.000	0,00%	81,23 %	0,00	8.093.000	0,00%	0,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun*) ( )	0,00	-	0,00	-	6	3.569.000	1	-	2	1.125.000	1	-	2	2.295.000	6	3.420.000	100,00 %	95,83 %	6,00	3.420.000	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah dokumen administrasi keuangan BPKAD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	94		4		-	-	-		4			4,26%			4,00		0,00%	
		Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu*) (%)	0,00	-	0,00	-	55	36.874.794.007	55	4.146.228.629	-	-	-	6.108.715.344	-	14.151.293.055	55	32.054.357.166	100,00 %	86,93 %	55,00	32.054.357.166	0,00%	0,00%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji, Tunjangan, Jaminan Kesehatan ASN*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	5004	36.832.015.847	###	4.130.727.429	5.004	7.643.395.138	5.004	6.105.823.744	5.004	14.146.838.855	5.004	32.026.785.166	100,00 %	86,95 %	5004,00	32.026.785.166	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang tersusun*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	75	30.683.510	140	10.875.000	44	4.725.000	145	2.261.600	184	3.504.200	513	21.365.800	684,00 %	69,63 %	513,00	21.365.800	0,00%	0,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*) (dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	2.814.700	1	1.858.800	-	-	-	-	-	-	1	1.858.800	100,00 %	66,04 %	1,00	1.858.800	0,00%	0,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD tersusun* (dokumen)	0,00	-	0,00	-	18	9.279.950	4	2.767.400	6	-	4	630.000	4	950.000	18	4.347.400	100,00%	46,85%	18,00	4.347.400	0,00%	0,00%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis administrasi kepegawaian BPKAD (Jenis)	0,00	-	0,00	-	2	48.125.000	-	-	-	-	-	18.469.000	-	25.806.000	-	44.275.000	0,00%	92,00%	0,00	44.275.000	0,00%	0,00%
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya* (stel)	0,00	-	0,00	-	50	48.125.000	-	-	-	-	50	18.469.000	-	25.806.000	50	44.275.000	100,00%	92,00%	50,00	44.275.000	0,00%	0,00%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	0,00%	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah jenis pelayanan administrasi umum BPKAD (Jenis)	0,00	-	0,00	-	7	2.068.284.764	-	26.875.004	-	223.082.798	-	95.425.070	-	1.407.218.854	-	1.752.601.726	0,00%	84,74%	0,00	1.752.601.726	0,00%	0,00%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	10	14.269.640	10	1.920.000	10	715.000	10	867.000	10	6.791.000	10	10.293.000	100,00%	72,13%	10,00	10.293.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	7	1.027.233.314	7	3.435.570	7	59.872.840	7	16.115.000	7	864.004.260	7	943.427.670	100,00%	91,84%	7,00	943.427.670	0,00%	0,00%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	2	59.231.810	2	2.860.000	2	13.665.000	2	7.340.000	2	23.504.000	2	47.369.000	100,00%	79,97%	2,00	47.369.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan* (unit)	0,00	-	0,00	-	2	1.800.000	2	-	2	-	2	300.000	2	500.000	2	800.000	100,00%	44,44%	2,00	800.000	0,00%	0,00%



	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*) (kali)	0,00	-	0,00	-	3	965.750.000	3	18.659.434	3	148.829.958	3	70.803.070	3	512.419.594	3	750.712.056	100,00%	77,73%	3,00	750.712.056	0,00%	0,00%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah jenis pengadaan BMD kantor BPKAD (Jenis)	0,00	-	0,00	-	2	162.153.090	-	-	-	158.754.550	-	-	-	-	-	158.754.550	0,00%	97,90%	0,00	158.754.550	0,00%	0,00%
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	1	137.257.890	-	-	1	135.100.000	-	-	-	1	135.100.000	100,00%	98,43%	1,00	135.100.000	0,00%	0,00%	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan*) (unit)	0,00	-	0,00	-	1	24.895.200	-	-	1	23.654.550	-	-	-	1	23.654.550	100,00%	95,02%	1,00	23.654.550	0,00%	0,00%	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis pelayanan jasa penunjang urusan pada kantor BPKAD (Jenis)	0,00	-	0,00	-	4	479.278.107	-	90.585.192	-	57.675.243	-	70.234.599	-	127.322.387	-	345.817.421	0,00%	72,15%	0,00	345.817.421	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah kebutuhan Surat Menyurat yang tersedia*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	1	1.966.800	1	62.000	1	-	1	-	1	-	1	62.000	100,00%	3,15%	1,00	62.000	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	3	263.665.383	3	42.648.446	3	25.002.579	3	34.181.153	3	46.233.059	3	148.065.237	100,00%	56,16%	3,00	148.065.237	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*) (bulan)	0,00	-	0,00	-	1	1.570.000	1	-	1	392.500	1	296.700	1	-	1	689.200	100,00%	43,90%	1,00	689.200	0,00%	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor *) (bulan)	0,00	-	0,00	-	6	212.075.924	6	47.874.746	6	32.280.164	6	35.756.746	6	81.089.328	6	197.000.984	100,00%	92,89%	6,00	197.000.984	0,00%	0,00%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah jenis pemeliharaan BMD kantor BPKAD (Jenis)	0,00	-	0,00	-	5	292.282.880	-	8.678.150	-	61.579.200	-	23.001.550	-	135.848.250	-	229.107.150	0,00%	78,39%	0,00	229.107.150	0,00%	0,00%



		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	14.428.640	-	-	-	-	-	1.875.000	2	7.908.100	2	9.783.100	100,00%	67,80%	2,00	9.783.100	0,00%	0,00%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	0,00	-	0,00	-	40	22.236.640	40	-	40	-	40	-	40	18.918.300	40	18.918.300	100,00%	85,08%	40,00	18.918.300	0,00%	0,00%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	0,00	-	0,00	-	40	22.236.640	40	-	40	-	40	-	40	18.290.700	40	18.290.700	100,00%	82,25%	40,00	18.290.700	0,00%	0,00%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	0,00	-	0,00	-	40	6.464.600	40	-	40	-	40	-	40	489.700	40	489.700	100,00%	7,58%	40,00	489.700	0,00%	0,00%
		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah SKPD (SKPD)	0,00	-	0,00	-	40	6.464.600	40	-	40	-	40	-	40	508.300	40	508.300	100,00%	7,86%	40,00	508.300	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah dokumen Perda APBD dan Perkada APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	131.036.370	-	-	-	8.925.000	2	19.808.200	-	76.079.500	2	104.812.700	100,00%	79,99%	2,00	104.812.700	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah dokumen Perda P APBD dan Perkada P APBD dan Perda P APBD dan Perkada P APBD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	105.009.500	-	-	-	21.996.500	-	32.530.000	2	22.552.000	2	77.078.500	100,00%	73,40%	2,00	77.078.500	0,00%	0,00%
		Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen Pedoman Penyusunan RKA SKPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	21.302.600	-	900.000	4	-	2	7.050.700	-	7.414.600	6	15.365.300	100,00%	72,13%	6,00	15.365.300	0,00%	0,00%
		Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah dokumen perencanaan anggaran pembiayaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	12.462.080	-	3.832.500	1	6.000.000	-	-	2	-	3	9.832.500	100,00%	78,90%	3,00	9.832.500	0,00%	0,00%

	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah dokumen perbendaharaan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	10954	429.318.250	-	51.407.800	-	35.000.500	-	135.848.200	-	90.578.400	-	312.834.900	0,00%	72,87%	0,00	312.834.900	0,00%	0,00%
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen SPD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	750	31.654.870	250	5.400.000	182	3.600.000	318	4.988.900	102	9.962.000	852	23.950.900	113,60%	75,66%	852,00	23.950.900	0,00%	0,00%
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	182.265.230	-	32.023.800	-	15.113.500	-	33.443.100	1	39.982.400	1	120.562.800	100,00%	66,15%	1,00	120.562.800	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah jenis (Jenis)	0,00	-	0,00	-	9	9.999.700	9	-	9	-	9	4.624.000	9	495.000	9	5.119.000	100,00%	51,19%	9,00	5.119.000	0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	46.414.190	-	-	-	7.960.000	-	14.530.000	1	15.710.000	1	38.200.000	100,00%	82,30%	1,00	38.200.000	0,00%	0,00%
	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	jumlah kali (kali)	0,00	-	0,00	-	4	11.624.580	-	-	-	1.335.000	3	2.938.000	1	-	4	4.273.000	100,00%	36,76%	4,00	4.273.000	0,00%	0,00%

	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	43.874.670	-	8.584.000	-	3.392.000	-	12.261.000	-	14.231.000	-	38.468.000	0,00%	87,68%	0,00	38.468.000	0,00%	0,00%
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	2	103.485.010	-	5.400.000	-	3.600.000	-	63.063.200	2	10.198.000	2	82.261.200	100,00%	79,49%	2,00	82.261.200	0,00%	0,00%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	Jumlah dokumen pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	41	938.997.990	8	99.503.070	-	164.914.440	-	221.751.480	-	375.180.200	8	861.349.190	19,51%	91,73%	8,00	861.349.190	0,00%	0,00%
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	7	131.017.120	1	26.544.070	4	20.198.000	1	30.266.750	1	48.298.100	7	125.306.920	100,00%	95,64%	7,00	125.306.920	0,00%	0,00%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	103.002.740	-	4.815.800	3	12.239.300	-	34.621.750	1	44.381.400	4	96.058.250	100,00%	93,26%	4,00	96.058.250	0,00%	0,00%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	162.639.360	3	11.164.000	1	25.139.640	2	33.251.000	2	86.228.700	8	155.783.340	100,00%	95,78%	8,00	155.783.340	0,00%	0,00%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	257.699.190	1	10.050.000	-	78.557.700	-	43.054.800	2	121.715.000	3	253.377.500	100,00%	98,32%	3,00	253.377.500	0,00%	0,00%

	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	6	165.839.800	1	9.855.000	3	20.168.100	2	71.097.880	-	45.261.200	6	146.382.180	100,00%	88,27%	6,00	146.382.180	0,00%	0,00%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	12	46.821.590	3	11.628.400	3	6.616.400	3	8.636.400	3	15.502.800	12	42.384.000	100,00%	90,52%	12,00	42.384.000	0,00%	0,00%
	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	15.108.940	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100,00%	0,00%	1,00	-	0,00%	0,00%
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah FGD (FGD)	0,00	-	0,00	-	2	56.869.250	1	25.445.800	-	1.995.300	-	822.900	-	13.793.000	1	42.057.000	50,00%	73,95%	1,00	42.057.000	0,00%	0,00%
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	Jumlah Jenis kewenangan pengelolaan keuangan daerah (Jenis)	0,00	-	0,00	-	2	#####	-	60.468.167.139	-	4.624.063.619	-	53.507.726.516	-	117.590.538.351	-	236.190.495.625	0,00%	94,15%	0,00	236.190.495.625	0,00%	0,00%
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan (Desa)	Jumlah Desa yang tersalurkan Bantuan Keuangan (Desa)	0,00	-	0,00	-	130	#####	130	55.168.941.774	-	4.624.063.619	-	53.507.726.516	-	116.418.191.751	130	229.718.923.660	100,00%	99,75%	130,00	229.718.923.660	0,00%	0,00%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	20.569.890.343	-	5.299.225.365	-	-	-	-	1	1.172.346.600	1	6.471.571.965	100,00%	31,46%	1,00	6.471.571.965	0,00%	0,00%
																			<b>Rata-Rata Capaian Kinerja (%)</b>	99,97%	94,07%			
																				<b>Predikat Kinerja</b>	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH																					Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah		
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	47	8.158.957.644	-	110.148.000	-	3.576.391.850	-	368.271.450	-	3.012.493.030	-	7.067.304.330	0,00%	86,62%	0,00	7.067.304.330	0,00%	0,00%
		Penyusunan Standar Harga	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	50.533.310	-	12.110.600	-	13.380.000	1	3.060.000	-	16.838.400	1	45.389.000	100,00%	89,82%	1,00	45.389.000	0,00%	0,00%
		Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	4	3.815.197.160	-	7.998.000	-	3.385.481.370	2	51.158.500	2	42.619.700	4	3.487.257.570	100,00%	91,40%	4,00	3.487.257.570	0,00%	0,00%
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	jumlah dokumen (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	3	41.943.640	3	10.590.000	-	2.055.000	-	7.764.000	-	19.269.300	3	39.678.300	100,00%	94,60%	3,00	39.678.300	0,00%	0,00%
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	16	289.451.490	-	5.700.000	-	79.387.000	16	37.738.000	-	130.690.100	16	253.515.100	100,00%	87,58%	16,00	253.515.100	0,00%	0,00%
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen Inventarisasi Barang Milik Daerah (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	1	25.724.300	-	-	-	-	-	1	19.514.300	1	19.514.300	100,00%	75,86%	1,00	19.514.300	0,00%	0,00%	
		Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	158	1.155.051.859	10	24.424.000	120	887.480	25	158.339.220	8	535.879.670	163	719.530.370	103,16%	62,29%	163,00	719.530.370	0,00%	0,00%
		Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Obyek BMD yang dinilai untuk dicatat, dimanfaatkan dan dipindahtangankan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	41	189.771.140	-	-	45	23.100.000	-	10.170.000	16	37.451.250	61	70.721.250	148,78%	37,27%	61,00	70.721.250	0,00%	0,00%

	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah (Laporan)	0,00	-	0,00	-	12	2.241.836,065	-	15.110.400	6	27.774.000	2	33.124.230	6	2.086.097,710	14	2.162.106,340	116,67%	96,44%	14,00	2.162.106,340	0,00%	0,00%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah keluar) BMD per 31 Desember 2021 Jumlah buku rekap pemindahtanganan (hibah masuk) BMD per 31 Desember 2021 Jumlah dokumen laporan hasil kegiatan Jumlah dokumen monitoring pemanfaatan dan monitoring penggunaan BMD Jumlah dokumen pelaksanaan pemanfaatan BMD Jumlah dokumen pemusnahan BMD per Desember 2021 Jumlah dokumen penghapusan BMD per Desember 2021 Jumlah dokumen rekonsiliasi pemanfaatan dan penggunaan BMD Jumlah sosialisasi pemanfaatan dan penggunaan (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	9	187.141,640	-	7.080,000	-	29.357,000	-	36.711,250	9	83.237,650	9	156.385,900	100,00%	83,57%	9,00	156.385,900	0,00%	0,00%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD (Dokumen)	0,00	-	0,00	-	8	44.803,090	-	11.985,000	2	7.460,000	2	15.135,000	4	9.021,600	8	43.601,600	100,00%	97,32%	8,00	43.601,600	0,00%	0,00%





## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa capaian kinerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 berdasarkan indikator yang telah ditetapkan rata-rata sangat baik, ini bukan berarti tidak ada persoalan, karena yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset tentulah masalahnya tidak akan ada henti-hentinya. Pencapaian pengelolaan keuangan, setiap tahun anggaran harus disusun dalam bentuk APBD dan APBD perubahan sebagai dasar pelaksanaannya, dan pelaksanaan atas APBD tersebut haruslah dikawal dari proses penganggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangannya. Pengelolaan aset daerah adalah hal yang sama, setiap tahun harus dikawal dan dikelola dengan baik, karena berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang setiap tahun dibuat. Kalau tidak dikawal dan dikelola dengan baik, bagaimana mungkin neraca SKPD dan neraca Pemerintah Daerah dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat diyakini kewajarannya. Oleh karena itu untuk peningkatan pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah tetaplah menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut dalam rangka pencapaian akuntabel yakni yang berkaitan dengan tata kelola keuangan agar tetap bisa mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah kita capai 9 (Sembilan) tahun berturut-turut.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Tanah Laut selaku koordinator pengelolaan keuangan dan aset daerah, maka keberhasilan pelaksanaan suatu program kegiatan sangat dipengaruhi beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak belum optimal capaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau bahkan seolah-olah ada kesan perencanaan anggaran dari program kegiatan kurang maksimal. Secara umum, dapat diinformasikan beberapa kendala/permasalahan yang perlu diantisipasi terkait dengan belum optimalnya capaian kinerja SKPD, antara lain :

- 1). Adanya beberapa update peraturan perundang undangan. Oleh karena itu, untuk mendukung kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah menjadi lebih baik, maka sebelum menyusun dan menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan perlu membangun komunikasi yang

lebih intensif antar K/L/D/I dengan pemerintah daerah atau lembaga teknis sebagai pelaksana kebijakan serta dilakukan kajian dan analisa yang komprehensif terhadap outcome, benefit dan impact apabila peraturan tersebut diterapkan ;

- 2) Masih adanya pemahaman dan persepsi yang berbeda terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, utamanya tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya advokasi pembinaan, bintek, pelatihan dan pendampingan kepada para pengelola keuangan dan aset daerah ;
- 3) Efektifitas tahun anggaran masih kurang dari 12 (dua belas) bulan. Hal ini antara lain disebabkan masih terbatasnya kualitas Sumber Daya Aparatur yang memiliki pola pikir simultan, kreatif dan inovatif terhadap penyusunan perencanaan anggaran, program kegiatan, pelaksanaan, penatausahaan sampai dengan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas dan pola pikir sumber daya aparatur, secara periodik dilakukan rekonsiliasi dan pendampingan pengelola keuangan daerah.

Sebagai gambaran atas analisis kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dilingkungan BPKAD Kabupaten Tanah Laut dari tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.30 dibawah ini :

TABEL TC 30																						
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 - 2021 DAN PROYEKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2021-2023																						
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT																						
NO	TUJUAN	KINERJA UTAMA	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2018	REALISASI 2018	CAPAIAN (%)	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN (%)	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN (%)	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN (%)	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	TARGET AKHIR RENSTRA 2023			
1	2	3	4	5	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1	Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.	1	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1	Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP			
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah	2	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah	82	87	106,10%	82	90	109,76%	83	93	112,05%	84	94,16	112,10%	85	86			
		3	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	Persentase SKPD yang menyanggapi perencanaan penganggaran sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4	Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	4	Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		5	Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan	5	Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		6	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	6	Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan	100%	100%	100%	87%	100%	100%	89%	30	33,70%	90%				92%	95%		
		7	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	7	Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0	0%	100%				100%	100%		
		8	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	8	Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	150%	150%	100%				100%	100%		
		9	Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan	9	Persentase RKEMD SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		10	Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan	10	Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		11	Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan	11	Persentase BMD yang dicatat dengan akurat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		12	Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	12	Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	108,80%	108,80%	100%	2700%	2700%	100%				100%	100%		
		3	Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien	11	Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran	13	Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				12	Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD	14	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				13	Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD	15	Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
14	Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD			16	Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
15	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	17	Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	64,15	64,74	100,92%	66	74,98	113,61%	67	88,43	131,99%	68	88,91	130,75%	69	70					

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sesuai dengan Dokumen Renstra BPKAD Tahun 2018-2023 bahwa target kinerja indikator yang telah ditetapkan dan yang telah dilaksanakan serta proyeksi capaian realisasi kinerja SKPD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Indikator sasaran Opini BPK RI Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target WTP telah tercapai sampai dengan tahun 2020 selama 3 (tiga) tahun Renstra, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
2. Indikator Sasaran Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah capaian kinerja dari tahun

2018 sd 2020 mengalami kenaikan kinerja, sedangkan untuk proyeksi tahun 2021 sd 2023 ditargetkan terdapat kenaikan kinerja.

3. Indikator Sasaran Persentase SKPD yang menyampaikan perencanaan penganggaran sesuai ketentuan dengan capaian dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
4. Indikator Sasaran Persentase stakeholder yang dilayani penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
5. Indikator Sasaran Persentase pelaporan Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
6. Indikator Sasaran Persentase BMD (Tanah) yang memiliki Sertifikat sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 mengalami penurunan kinerja setiap tahunnya disebabkan adanya kendala pada Kantor Agraria, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
7. Indikator Sasaran Persentase BMD (Kendaraan bermotor) yang memiliki BPKB sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun 2020 tidak tercapai dikarenakan tidak adanya permohonan dan untuk tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
8. Indikator Sasaran Persentase BMD yang telah dipelihara sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun 2020 mengalami kenaikan kinerja sebesar 150% dan untuk tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
9. Indikator Sasaran Persentase RKBMD SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2019 tercapai 100%, sedangkan tahun 2020 tidak tercapai dan untuk tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
10. Indikator Sasaran Persentase BMD yang dimanfaatkan sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.

11. Indikator Sasaran Persentase BMD yang dicatat dengan akurat dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
12. Indikator Sasaran Persentase Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 mengalami kenaikan kinerja diatas 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.
13. Indikator Sasaran Persentase kinerja sarpras yang terpenuhi dan dipelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
14. Indikator Sasaran Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yg terpenuhi dan terpelihara dgn baik dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
15. Indikator Sasaran Persentase Perencanaan dan Kinerja yang tersusun dengan baik sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
16. Indikator Sasaran Persentase Laporan Keuangan dan Kinerja Keuangan SKPD sesuai ketentuan dari tahun 2018 sd tahun 2020 tercapai 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan juga tercapai 100%.
17. Indikator Sasaran Nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun 2018 sd tahun 2020 mengalami kenaikan melebihi 100%, sedangkan tahun 2021 sd 2023 diproyeksikan tercapai 100%.

Dengan demikian secara keseluruhan pencapaian 17 indikator sasaran kinerja selama 3 (tiga) tahun Renstra terdapat kenaikan pencapaian kinerja walaupun secara per indikator sasaran ada yang tercapai, namun ada yang mengalami penurunan dan ada juga yang mengalami kenaikan atau melebihi target, namun secara pencapaian kinerja SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut dapat dinilai bahwa telah berkinerja dengan sangat baik hal ini dapat terlihat dari tujuan SKPD yaitu untuk mempertahankan Opini WTP dalam pengelolaan keuangan dan aset

daerah telah tercapai, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan.

### **2.3. Isu – Isu Strategis**

Berdasarkan analisis Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal (SWOT) di atas, maka dapat ditetapkan dan dirumuskan yang menjadi isu-isu strategis pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

#### **a. Peningkatan pengelolaan keuangan daerah**

Peningkatan pengelolaan keuangan sangatlah vital, dimulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan belanja, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Proses penyusunan anggaran haruslah secermat mungkin, karena apabila salah pada tahap penganggaran, sudah tentu akan semakin bertambah salah pada waktu pelaksanaan belanja, sehingga akan menyulitkan pada waktu penatausahaan dan akan diragukan akuntabilitasnya saat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, melalui perencanaan penganggaran yang tepat, akurat, wajar, memenuhi aspek kepatutan, efisien dan efektif, taat pada peraturan perundang-undangan, maka akan membawa manfaat yang sangat besar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Begitu juga dengan pelaksanaan belanja yang benar, akuntabel dan dikelola dengan baik tentunya akan memberikan nilai positif bagi pemerintah daerah dan akan mendapatkan Opini yang optimal bagi pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang setiap tahunnya dilakukan audit oleh BPK RI.

**b. Kelengkapan penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.**

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, merupakan isu-isu yang tidak bisa dikesampingkan, karena begitu penting dan sangat menentukan, tidak saja bagi kredibilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, tetapi juga bagi nasib rakyat Tanah Laut. Proses penganggaran yang baik, kesesuaian pelaksanaan belanja, penatausahaan keuangan yang tertib, dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel, bukan merupakan hasil akhir dalam pengelolaan keuangan daerah, karena apabila kelengkapan dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih banyak kekurangannya, maka penilaian atau opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh BPK RI menjadi kurang/minus pula. Dalam penyajian penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan aturan yang telah ditetapkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tentunya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disampaikan setiap tahun mengharapkan mendapat opini yang terbaik, karena hal ini sebagai bentuk cerminan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

**C. Peningkatan pengelolaan aset daerah.**

Aspek lain yang menjadi isu penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD adalah berkaitan dengan peningkatan pengelolaan aset daerah. Disadari bahwa untuk pengelolaan aset daerah dahulu-dahulunya terpinggirkan, namun sekarang ini menjadi hal yang sangat penting dan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena bagaimana mungkin sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat disusun dan disajikan dengan benar dan dapat diyakini kewajarannya kalau pengelolaan aset daerah yang disajikan tidak tertib dan meragukan. Oleh karena itu penataan aset daerah menjadi salah satu prioritas untuk segera dituntaskan dan terus dilakukan bagi tersajinya suatu Neraca SKPD dan Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan  
BPKAD Kabupaten Tanah Laut

No.	Permasalahan	Faktor Yang Mempengaruhi
1.	Terbatasnya jumlah PNS pada BPKAD yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan keuangan dan aset	1. Keterbatasan jumlah PNS yang memiliki pendidikan spesifik pengelolaan keuangan dan aset 2. Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan dan aset yang terintegrasi dan



		konsisten.
2.	Belum seimbang antara Rencana Pendapatan Daerah dengan Rencana Belanja Daerah dalam APBD sehingga APBD defisit.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola pendapatan dalam merencanakan pendapatan.</li> <li>2. Perencanaan pendapatan masih disusun bersifat inkremental bukan berdasarkan potensi yang ada.</li> <li>3. Terlambatnya informasi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkaitan dengan rencana pendapatan bagi hasil dan rencana dana perimbangan.</li> </ol>
3.	Penetapan Perda tentang APBD dan Perubahan APBD masih belum tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya SKPD dalam menyusun RKA , sehingga memperpanjang pembahasan RKA oleh TAPD.</li> <li>2. Berlarut-larutnya pembahasan KUA/PPAS dan RAPBD di legislatif.</li> </ol>
4.	Penetapan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD masih belum tepat waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum lancarnya proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD).</li> <li>2. Belum tertibnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran dan tahunan</li> <li>3. Lamanya proses reviu atas LKPD oleh Itwilkab.</li> <li>4. Berlarut-larutnya proses pembahasan Perda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di legislatif.</li> </ol>
5.	Belum optimalnya pengelolaan aset daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya pengguna barang dan pengurus barang dalam mengelola barang SKPD.</li> <li>2. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang pengelolaan barang daerah.</li> <li>3. Belum tertibnya penyampaian laporan berkaitan dengan barang SKPD</li> <li>4. Sebagian masih ditemukan oleh auditor pencatatan aset yang belum diyakini kewajarannya.</li> </ol>
6.	Belum semuanya ketentuan lebih lanjut (Perda, Perbup, SK) tentang pengelolaan keuangan dan aset diterbitkan/disesuaikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbatasnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset.</li> <li>2. Beban kerja yang cukup tinggi.</li> <li>3. Cepatnya perubahan regulasi berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset.</li> </ol>
7.	Belum optimalnya pengelolaan bantuan hibah dan bantuan social	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum dipahami sepenuhnya ketentuan tentang Bantuan Hibah dan Bantuan sosial oleh SKPD terkait dan Organisasi / masyarakat.</li> </ol>

8.	Belum diketahuinya tingkat kepuasan masyarakat/SKPD berkaitan dengan pemberian layanan	1. Belum dibuatnya kotak saran/ aduan masyarakat/SKPD 2. Belum terorganisirnya penanganan pengaduan masyarakat/SKPD
9.	Belum tertibnya penataan arsip/dokumentasi	1. Belum adanya PNS yang memiliki pendidikan kearsipan/dokumentasi 2. Terbatasnya ruangan untuk pengelolaan arsip/dokumentasi
10.	Belum tertibnya penyajian data dan informasi	1. Tidak terfokusnya PNS yang mengelola penyajian data dan informasi.

Berdasarkan gambaran identifikasi permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tentunya akan dapat dirumuskan dan ditentukan isu-isu strategis SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya yang harus mendapat prioritas dan penanganan secara sungguh-sungguh selama kurun waktu 2018-2023. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauhmana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review ini, didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-SKPD (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) tahun berjalan.

#### **2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program dan kegiatan sesuai dengan renstra SKPD BPKAD yang substansi kegiatannya disesuaikan dengan isu-isu penting terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD yang harus segera diatasi, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan pengelolaan kekayaan daerah.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam rangka sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program di daerah, khususnya BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset, yang menjadi faktor pendorong dan penghambat tidaklah jauh berbeda. Faktor pendorong dan faktor penghambat berkaitan dengan Renstra Instansi di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan aset dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Pengelolaan Keuangan :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- c) Adanya simda keuangan.
- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.
- e) Adanya semangat aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
- f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar secepatnya dari Opini WDP menuju WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan keuangan daerah .

- g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah melalui Bintek/Diklat.
- h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

2) Faktor penghambat :

- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b) Belum adanya sistem pengembangan SDM keuangan yang terintegrasi dan konsisten.
- c) Berlarut-larutnya pembahasan Raperda tentang APBD dan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di lembaga legislatif.
- d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan keuangan Daerah.
- e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
- f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan keuangan SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
- g) Belum diketahuinya tingkat kepuasan layanan masyarakat / SKPD berkaitan dengan layanan keuangan daerah.

b. Pengelolaan aset daerah :

1) Faktor pendorong :

- a) Adanya regulasi berupa Perda, Perbup, dan ketentuan lainnya sebagai dasar pengelolaan aset daerah
- b) Dukungan dana, sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengelolaan aset daerah.
- c) Adanya simda Barang Milik Daerah (Simda BMD).

- d) Terbukanya kerjasama dengan Instansi lain dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
  - e) Adanya semangat dari aparatur untuk bekinerja lebih baik dalam penataan dan pengelolaan aset daerah.
  - f) Adanya komitmen dari pimpinan tertinggi daerah dalam tata kelola keuangan agar mempertahankan Opini WTP, dimana dalam hal ini salah satunya berkaitan dengan tertibnya pengelolaan aset daerah.
  - g) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas aparatur dalam pengelolaan aset daerah melalui Bintek/Diklat.
  - h) Adanya dukungan dari pemerintah yang lebih atas dalam rangka peningkatan pengelolaan aset daerah.
- 2) Faktor penghambat :
- a) Terbatasnya jumlah dan kemampuan PNS yang memiliki spesifikasi pendidikan dalam pengelolaan aset daerah.
  - b) Belum adanya sistem pengembangan SDM aset daerah yang terintegrasi dan konsisten.
  - c) Berlarut-larutnya penerbitan sertifikat tanah-tanah daerah pada instansi vertikal.
  - d) Belum dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya ketentuan dan peraturan tentang pengelolaan aset daerah.
  - e) Masih belum lengkapnya ketentuan lebih lanjut sebagai pedoman pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
  - f) Masih belum lancarnya penyampaian laporan aset SKPD bulanan, triwulanan, smesteran, dan tahunan.
  - g) Masih banyak pengguna barang yang kurang berkomitmen dalam pengelolaan barang SKPD secara tertib dan benar.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

#### A. Tujuan

Tujuan Strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari Pernyataan Visi dan Pernyataan Misi Kepala Daerah terpilih yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Visi Kepala Daerah adalah Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI sedangkan Misi Kepala Daerah untuk BPKAD kabupaten Tanah Laut terdiri dari 2 (dua) Misi yaitu : Misi ke 2 : Menciptakan inovasi disegala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif dan Misi ke 3 : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Dengan disinkronisasikannya Visi, Misi kepala Daerah maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut harus menentukan Tujuan strategis agar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi Visi dan Misi untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangan semua sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Visi dan Misi yang telah ditetapkan agar bisa dicapai dituangkan dan dijabarkan dalam tujuan, dengan adanya tujuan yang telah ditetapkan pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut akan memudahkan bagi Kepala Badan beserta jajarannya untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh BPKAD Kabupaten Tanah Laut sehubungan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja Pengelolaan Keuangan secara tertib, akuntabel dan transparan.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan dan Penatausahaan aset Daerah secara tertib.
3. Terwujudnya tata kelola Administrasi yang tertib, efektif dan efisien

## B. Sasaran

Dengan telah ditetapkannya tujuan untuk mencapai kinerja yang diinginkan dan untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut, maka BPKAD Kabupaten Tanah Laut ditetapkan sasaran. Sasaran adalah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis. Sasaran harus menggambarkan hal yang akan dicapai melalui berbagai proses dan kegiatan agar tercapai tujuan yang ditetapkan. Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan keuangan dan aset daerah
3. Meningkatnya kualitas penganggaran keuangan sesuai ketentuan
4. Meningkatnya kualitas pemberian pelayanan kepada stakeholder dalam Penatausahaan keuangan dan pembiayaan daerah sesuai ketentuan
5. Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan Pemkab sesuai ketentuan
6. Meningkatnya kualitas pengendalian BMD sesuai ketentuan
7. Meningkatnya kualitas penyusunan RKBMD sesuai ketentuan
8. Meningkatnya kualitas pemanfaatan BMD sesuai ketentuan
9. Meningkatnya kualitas Inventarisasi BMD sesuai ketentuan
10. Meningkatnya kualitas Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD sesuai ketentuan
11. Meningkatnya kualitas pemenuhan sarpras perkantoran
12. Meningkatnya pemberian pelayanan administrasi kepegawaian SKPD
13. Meningkatnya kualitas perencanaan dan kinerja SKPD
14. Meningkatnya kualitas Laporan keuangan & Kinerja Keuangan SKPD
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih serta target dan sasaran pembangunan yang dijabarkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023. Selain itu, Renja-SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang melibatkan berbagai unsur yang mempunyai fungsi-fungsi untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dan memperhatikan sumber daya yang diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan penyusunan usulan rencana kegiatan yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022. Renja-SKPD sebagai salah satu alat perencanaan merupakan alat perencana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa dan/atau apa yang dihasilkan dari alokasi anggaran yang ada. Selain itu, anggaran sebagai alat perencanaan juga digunakan untuk melakukan :

- a. Merumuskan tujuan dan sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi misi yang telah ditetapkan ;
- b. Merencanakan berbagai program kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan ;
- c. Mengalokasikan anggaran untuk berbagai program kegiatan yang telah disusun ;
- c. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategis.

## **4.1 Program dan Kegiatan**

### **A. Program**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, SKPKD selaku PPKD (dalam hal ini BPKAD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rancangan APBD, Rancangan Perubahan APBD dan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Mendasari ketentuan tersebut, BPKAD dalam menyusun program kegiatannya bersifat reguler, mengkoordinir, memfasilitasi dan mendukung SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut menjabarkannya ke dalam program-program kerja lima tahunan dan program kerja tahunan. Adapun Program-program dimaksud pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah kabupaten kota
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Barang Milik daerah

### **B. Kegiatan**

Langkah lebih lanjut setelah ditetapkannya Program adalah ditetapkannya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan dan Sub Kegiatan inilah nantinya akan diimplementasikan lebih lanjut ke dalam RKA SKPD yang akan dimasukkan dalam APBD yang tentunya setelah melalui proses yang berlaku sesuai ketentuan, dan baru bisa dilaksanakan setelah menjadi DPA SKPD.

Dalam penyampaian Renja BPKAD, kegiatan yang diajukan tentunya mengacu kepada RPJMD dan Renstra SKPD BPKAD dengan dana indikatif untuk selanjutnya diproses masuk ke dalam RKPD dan setelah melalui proses menjadi acuan dalam penyusunan KUA/PPAS. KUA/PPAS inilah nantinya setelah disepakati antara pihak DPRD dan Pemerintah Daerah menjadi dasar bagi penyusunan RKA-SKPD.

Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur

pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun kegiatan- kegiatan dan Sub Kegiatan dimaksud pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 1.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - 3.1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - 4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya
  - 4.2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang –Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 5.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 5.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 5.3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5.4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5.5. Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 6.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 6.2. Pengadaan Mebel
  - 6.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
  - 6.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 7.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- 7.2. penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7.4. Penyediaan Jasa Umum kantor
- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - 8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
  - 8.3. Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
  - 8.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
- 9. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
  - 9.1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
  - 9.2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS
  - 9.3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
  - 9.4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
  - 9.5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD
  - 9.6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA – SKPD
  - 9.7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - 9.8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
  - 9.9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
  - 9.10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
- 10. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
  - 10.1. Penatausahaan Pembiayaan Daerah
  - 10.2. Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunaidengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - 10.3. Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
  - 10.4. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta

- Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait
- 10.5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
  - 10.6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
  11. Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
    - 11.1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
    - 11.2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
    - 11.3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
    - 11.4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 11.5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
    - 11.6. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
    - 11.7. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
    - 11.8. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
  12. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
    - 12.1. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
    - 12.2. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
  13. Pengelolaan Barang Milik Daerah
    - 13.1. Penyusunan Standar Harga
    - 13.2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah,
    - 13.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
    - 13.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

- 13.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah
- 13.6. Pengamanan Barang Milik Daerah
- 13.7. Penilaian Barang Milik Daerah
- 13.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 13.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
- 13.10 Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
- 13.11 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Adapun sebagai gambaran untuk menjabarkan Program dan Kegiatan yang diusulkan dalam Rencana Kerja Tahun 2023 BPKAD Kabupaten Tanah Laut dengan kinerja yang akan dicapai dapat digambarkan dalam kertas kerja sebagaimana tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 dan tabel Rekapitulasi Belanja Satuan Kerja BPKAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

**KABUPATEN TANAH LAUT**

**BADAN PENGELEOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan Permendagri 13 Tahun 2006	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Pemutakhiran	Lokasi Detail	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023					Kategori Penting	Prakiraan Maju Tahun 2024	
						Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Uraian Dana	Uraian Usulan	Uraian Kegiatan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
									0	1	2	3	4
			<b>URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH</b>										
<b>4</b>	<b>KEUANGAN</b>	<b>2</b>	<b>KEUANGAN</b>										
4	1	15	<b>Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD</b>	Kabupaten Tanah Laut	Indikator IKM	AIK (85)	9.424.908.068,00	APBD	-	-	-		11.453.670.899,00
4	1	5.06	Penyusunan Perencanaan dan Kinerja SKPD	Kabupaten Tanah Laut	Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	00%	18.028.748,00	APBD	-	-	-	7 Dok	20.160.200,00

	4	1	5. '0 7	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD			2	1	.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	abupate n Tanah laut	Ih Dokumen	Dokumen	8.550.557,00	APB D	-	-	-	Dokumen	9.603.500,00
	4	1	5. '0 8	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja SKPD			2	1	.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	abupate n Tanah laut	Ih Laporan	0 Laporan	9.478.191,00	APB D	-	-	-	0 Laporan	10.556.700,00
	4	1	1	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			2	1	.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	abupate n Tanah Laut	ersentase Capaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	00%	8.098.933.758 ,00		-	-			9.311.706.419 ,00
	4	1	1. '0 1	Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi			2	1	.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	abupate n Tanah laut	Ih ASN BPKAD Jumlah Bulan	5 ASN 12 Bulan	8.085.769.348 ,00	APB D	-	-	-	5 ASN 5004 Orang	9.297.226.569 ,00
	4	1	1. '0 2	Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran			2	1	.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	abupate n Tanah laut	Ih Dokumen	4 Dok	13.164.410,00	APB D	-	-		4 Dok	14.479.850,00



	4	1	1.	Penyediaan jasa penunjang kinerja SKPD																		
	4	1	'0 2.	<b>Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana / Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia</b>																		
	4	1	2. '0 4	Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran			2	1	.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	abupate n Tanah Laut	ersentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	00%	16.650.000,00			.-	.-			150.000.000,0 0
	4	1	2. '0 5	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor			2	1	.05	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	abupate n Tanah laut	umlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	16.650.000,00	APB D					0 Paket	0.000.000,00
	4	1	2. '0 6	Peningkatan kemampuan teknis aparatur			2	1	.05	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang -Undangan	abupate n Tanah laut	umlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0,00	APB D	.-	.-	.-	0 ASN	00.000.000,00	

	4	1	'03.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya			2	1	.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	abupaten Tanah Laut	ersentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	00%	443.425.314,00						477.306.575,00
	4	1	'03.01	<b>Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan dan Pelayanan SKPD</b>			2	1	.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	abupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6.569.361,00	APB D				Paket	15.113.175,00
	4	1	'15.05.	Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pembangunan			2	1	.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	abupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	85.722.838,00	APB D				Paket	00.000.000,00
	4	1	'15.02.00	<b>Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			2	1	.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	abupaten Tanah Laut	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	71.133.115,00	APB D				Paket	62.193.400,00
	4	1	'15.02.05	Peningkatan Administrasi Penatausahaan Keuangan Daerah																	

4	1	5. '2 8	Peningkatan Administrasi Pembiayaan Daerah			2	1	.06	9	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	abupaten Tanah laut	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	280.000.000,00	APBD	-	-	0 Laporan	300.000.000,00
4	1	'1 6	Penyusunan Raperda dan Raperbup tentang APBD dan Perubahan APBD			2	1	.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	abupaten Tanah Laut	persentase Capaian Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	00%	-		-	-		-
4	1	6. '0 1	<b>Program Peningkatan Penerapan Akuntansi dan Pelaporan</b>																
4	1	6. '0 2	Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keuangan daerah																
4	1	6. '0 3	Pengelolaan akuntansi pendapatan dan piutang																

	4	1	6. '0 4	Pengelolaan akuntansi belanja dan beban																
	4	1	6. '0 5	Penyusunan raperda dan raperbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD		2	1	.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	abupaten Tanah Laut	ersentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	00%	742.957.048,0 0		-	-			790.667.316,0 0
	4	1	7.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, laporan keuangan semesteran dan prognosis realisasi anggaran serta laporan keuangan akhir tahun.		2	1	.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	abupaten Tanah laut	umlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	317.000.000,0 0	APB D	-	-	-	Laporan	287.508.142,0 0
	4	1	7. '0 1	<b>Program Peningkatan Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Daerah</b>		2	1	.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	abupaten Tanah laut	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	00	APB D	-	-	-	Laporan	3.159.174,00

	4	1	7. '0 2	Peningkatan manajemen asset/barang daerah			2	1	.08	4	Penyediaan Jasa Umum kantor	abupate n Tanah laut	umlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	Laporan	425.957.048,0 0	APB D	-	-	-	Laporan	500.000.000,0 0
	4	1	7. '0 3	Perencanaan dan pengadaan asset daerah			2	1	.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	abupate n Tanah Laut	ersentase Capaian pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	00%	104.913.200,0 0		-	-			703.830.389,0 0
	4	1	8.	Pengelolaan pemanfaatan asset daerah			2	1	.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	abupate n Tanah laut	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11.250.000,00	APB D	-	-	-	Unit	19.106.115,00
	4	1	8. '0 1	<b>Program Peningkatan Penertiban Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Daerah</b>			2	1	.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	abupate n Tanah laut	umlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	53.750.000,00	APB D	-	-	-	1 Unit	83.714.274,00

4	1	8. '0 2	Penyusunan tabulasi data asset tetap			2	1	.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	abupate n Tanah laut	umlah Peralatan dan Mesin Lainnya yangDipelihara	0 Unit	19.800.000,00	APB D	-	-	-	Unit	48.457.500,00
			Pemindahtangan, pemusnahan dan penghapusan asset daerah			2	1	.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	abupate n Tanah laut	umlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	20.113.200,00	APB D	-	-	-	Gedung	52.552.500,00
						2	2			<b>Program Pengelolaan Keuangan daerah</b>	<b>abupate n Tanah laut</b>	<b>ipelihara/Direhabilitasi</b>	<b>TP</b>	<b>260.440.383.756,00</b>		-	-			<b>303.489.654.225,00</b>
						2	2	.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	abupate n Tanah laut	ersentase Capaian Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	00%	106.140.942,00		-	-			513.373.293,00
						2	2	.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	abupate n Tanah laut	umlah dokumen	Dok	5.708.816,00	APB D	-	-	-	Dok	36.962.047,00
						2	2	.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PerubahanPPAS	abupate n Tanah laut	umlah dokumen	Dok	5.708.816,00	APB D	-	-	-	Dok	26.781.982,00

							2	2	.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	abupate n Tanah laut	umlah SKPD	0 SKPD	1.954.000,00	APB D	-	-	-	0 SKPD	23.348.482,00
							2	2	.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	abupate n Tanah laut	umlah SKPD	1 SKPD	2.024.073,00	APB D	-	-	-	1 SKPD	23.348.482,00
							2	2	.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA - SKPD	abupate n Tanah laut	umlah SKPD	2 SKPD	818.850,00	APB D	-	-	-	2 SKPD	6.787.830,00
							2	2	.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA - SKPD	abupate n Tanah laut	umlah SKPD	3 SKPD	765.120,00	APB D	-	-	-	3 SKPD	6.787.830,00
							2	2	.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	abupate n Tanah laut	umlah Dokumen	Dok	40.008.687,00	APB D	-	-	-	Dok	205.114.560,0 0
							2	2	.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	abupate n Tanah laut	umlah Dokumen	Dok	40.152.027,00	APB D	-	-	-	Dok	155.475.600,0 0
							2	2	.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	abupate n Tanah laut	umlah Dokumen	Dok	7.041.851,00	APB D	-	-	-	Dok	22.367.730,00

						2	2	.01	2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	abupate n Tanah laut	umlah Dokumen	Dok	1.958.702,00	APB D	-	-	-	80 Dok	6.398.750,00
						2	2	.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	abupate n Tanah laut	Persentase Capaian Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	00%	106.083.434,00		-	-			243.275.250,00
						2	2	.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	80 Dok	2.067.760,00	APB D				80 Dok	60.000.000,00
						2	2	.02	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	30.706.392,00	APB D	-	-	-	Dok	80.210.250,00
						2	2	.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	abupate n Tanah laut	lh kali	Kali	2.250.000,00	APB D	-	-	-	Kali	5.500.000,00



						2	2	.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	abupate n Tanah laut	lh Dokument	Dok	12.456.000,00	APB D	-	-	-	Dok	43.527.500,00
						2	2	.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	abupate n Tanah laut	lh Kali	Kali	1.620.000,00	APB D	-	-	-	Kali	7.452.000,00
						2	2	.02	0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan Dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	13.326.000,00	APB D	-	-	-	Dok	43.500.000,00
						2	2	.02	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	0000	43.657.282,00	APB D	-	-	-	0000	63.085.500,00

							2	2	.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	abupate n Tanah laut	Persentase capaian Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	00%	296.224.480,0 0	APB D	-				1.278.271.112 ,00
							2	2	.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	32.991.790,00	PBD	-			Dok	168.029.326,0 0
							2	2	.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	43.587.920,00	PBD	-			Dok	134.902.309,0 0
							2	2	.03	0 3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	23.224.213,00	PBD	-			Dok	177.950.000,0 0
							2	2	.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	22.574.276,00	PBD	-			Dok	250.000.000,0 0

						2	2	.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	abupaten Tanah laut	Ih Dokumen	Dok	153.552.353,00	PBD	-			Dok	231.872.850,00
						2	2	.03	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	abupaten Tanah laut	Ih Dokumen	2 Dok	20.293.928,00	PBD	-			2 Dok	116.271.500,00
						2	2	.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	abupaten Tanah laut	ersentase Capaian Pelayanan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	00%	259.931.934.900,00	PBD	-				301.454.734.570,00
						2	2	.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	abupaten Tanah laut	Ih Desa	30 Desa	234.931.934.900,00	PBD	-			30 Desa	276.454.734.570,00
						2	2	.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	abupaten Tanah laut	Ih Dokumen	Dok	25.000.000.000,00	PBD				Dok	25.000.000.000,00

							2	3			<b>ROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	abupate n Tanah laut	pini BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Daerah	TP	8.724.908.286 ,00	PBD					8.993.436.597 ,00
							2	3	.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	abupate n Tanah laut	ersentase Capaian Pengelolaan BMD	00%	8.724.908.286 ,00	PBD					8.993.436.597 ,00
							2	3	.01	1	Penyusunan Standar Harga	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	57.152.606,00	PBD				Dok	46.857.940,00
							2	3	.01	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	abupate n Tanah laut	lh Dokumen Jlh Unit	1 Dok 49 Unit	8.299.999.921 ,00	PBD				1 Dok 49 Unit	6.971.818.350 ,00
							2	3	.01	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	abupate n Tanah laut	lh Dokumen	Dok	49.097.238,00	PBD				Dok	30.134.622,00
							2	3	.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	abupate n Tanah laut	lh Laporan	2 Laporan	13.896.051,00	PBD				6 Dok	325.500.000,0 0
							2	3	.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	abupate n Tanah laut	lh Laporan	Laporan	47.202.735,00	PBD				Dok	68.831.070,00
							2	3	.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah		lh Buku Jlh Buah ,	Buku 40 Buah Papan Nama 80 Buah Patok Tanda Batas	69.641.325,00	PBD				Buku 40 Buah Papan Nama 80 Buah Patok Tanda Batas	755.000.000,0 0



u m l a h						2	3	.01	3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	abupate n Tanah laut	lh Laporan	Laporan	18.309.245,00	PBD				0 SKPD 1 Dok	75.000.000,00
														<b>278.590.200.1 10</b>						<b>323.936.761.7 21</b>

Dari tabel diatas dapat dijelaskan rekapitulasi usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut bahwa Usulan Program sebanyak 3 Program, 12 Kegiatan dan 55 Sub Kegiatan total jumlah usulan sebesar Rp 278.590.200.110,00 dan Prakiraan maju tahun 2024 sebesar Rp 323.936.761.721,00.

REKAPITULASI BELANJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2023

No	Gaji dan TPP	Belanja Operasi (Barang dan Jasa)	Belanja Modal	Belanja Hibah	Belanja Transfer	Belanja Sosial (Terduga/tidak Terduga)	Keterangan
1	2	3	4	5		6	7
1	Rp 8.085.769.348	-	-	-	-	-	55 Jlh ASN BPKAD
2	-	Rp 9.584.450.218	-	-	-	-	-
3	-	-	Rp 988.045.644	-	-	-	Rp.988.045.644,- Belanja Modal Tanah
5	-	-	-	-	Rp 234.931.934.900	-	Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
6				-		Rp 25.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah	Rp 8.085.769.348	Rp 9.584.450.218	Rp 988.045.644	Rp -	Rp 234.931.934.900	Rp 25.000.000.000	Rp 278.590.200.110

Dari tabel diatas bahwa rekapitulasi belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Belanja Gaji dan TPP sebesar Rp 8.085.769.348,- untuk pembayaran 55 Jumlah ASN BPKAD .
2. Belanja Operasi (Barang dan Jasa) sebesar Rp 9.584.450.218,-
3. Belanja Modal sebesar Rp 988.045.644,- untuk Belanja Modal Tanah
4. Belanja Transfer sebesar Rp 234.931.934.900,- untuk Belanja Bantuan Keuangan 130 Desa
5. Belanja Terduga Terduga sebesar Rp 25.000.000.000,- untuk belanja Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak

Sehingga dengan demikian total Rencana Kerja belanja pada BPKAD Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp 278.590.200.110,-



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA-SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tanah Laut serta target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023.

RENJA-SKPD BPKAD adalah sebuah perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2023

RENJA –SKPD BPKAD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 dibuat dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait dengan isu-isu penting berkaitan dengan tugas fungsi BPKAD menyangkut pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah.

Dengan tersusunnya Renja-SKPD ini, penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan dengan pelaksanaan program kegiatan sebelumnya serta adanya sinkronisasi sesama SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut maupun dengan K/L/D/I maupun SKPD yang membidangi fungsi lain.

Pelaihari, 18 Juli 2022

Kepala BPKAD Kab. Tanah Laut,



Muhammad Darmin, S.IP, M.Si  
NIP. 19661227 198703 1 002